

Pamong Praja yang Melayani

Hendra Kurniawan

gala kehendak sehingga orang lain tunduk pada kemauannya. Kekuasaan pamong praja lebih ditekankan pada keleluasaan untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya guna kemaslahatan seluruh anggota masyarakat.

Jika merujuk pada definisi bahwa pamong praja adalah seluruh aparat negara yang bertugas melayani, mengayomi, mendampingi dan memberdayakan masyarakat, maka cakupannya menjadi semakin luas. Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, namun juga aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, hingga para pejabat politik dari daerah sampai ke pu-



Ilustrasi: Arko

sat. Khusus untuk pejabat politik yang dewasa ini dipilih langsung oleh rakyat tentu semakin menebalkan kewajiban moral yang diembannya sebagai abdi negara dan masyarakat.

Para pejabat pemerintahan harus memahami bahwa seorang pemimpin yang sejati harus berani menjadi pelayan. Siap menjadi pemimpin berarti siap untuk melayani orang-orang yang dipimpinnya bukan justru untuk minta dilayani. Paradigma seperti ini sangat dibutuhkan sejalan dengan kemajuan zaman dan perkembangan sosial politik dewasa ini. Masya-

rakat sekarang semakin cerdas dalam menyoroti kinerja para abdi negara. Dari kedisiplinan, kejujuran, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, hingga soal etos kerja menjadi objek yang sering dievaluasi oleh masyarakat guna menilai kinerja para pamongnya.

Sangat menarik melihat gaya beberapa kepala daerah yang berani mengubah kebiasaan dan bersikap progresif bagi kemajuan daerah yang dipimpinnya. Sayangnya ini belum dibarengi dan didukung birokrasi di bawahnya. Di saat ada gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, maupun lurah yang dengan lantang menyerukan reformasi birokrasi dan menanggalkan segala atribut feodalisme ternyata jajaran aparaturnya masih menganut gaya lama. Perilaku indisipliner, abai terhadap tugas, tidak peduli pada kebutuhan masyarakat, lalai dalam memberi pelayanan prima, hingga perangai koruptif masih menjadi makanan sehari-hari. Inspeksi mendadak dan serangkaian gebrakan yang dilakukan para kepala daerah tidak akan berarti tanpa perubahan mental. Diperlukan kesadaran agar para pemimpin yang berani bekerja keras melakukan perombakan tidak terus-menerus menelan pil pahit akibat borok yang dibuat jajaran di bawahnya.

Revolusi mental yang digadang-gadang oleh pemerintah terpilih saat ini tentu diharapkan dapat benar-benar terwujud. Sebelum menyetujui pada tataran masyarakat luas, maka langkah pertama harus dimulai dari lingkaran para penguasa dan birokratnya. Niat mulia ini penting agar revolusi mental tidak menjadi retorika belaka tanpa upaya. Inilah momentum tepat bagi seluruh pamong praja untuk menyerukan perubahan total dan tekad bersama. Pamong praja harus berani siap sedia menjadi abdi dan pelayan untuk negara dan masyarakat. □ - k.

*) **Hendra Kurniawan MPd,**
Dosen Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

HARI Pamong Praja diperingati setiap tanggal 8 September. Istilah pamong praja berasal dari bahasa Jawa. Pamong dari kata among atau momong yang berarti mengasuh dan praja berarti pegawai pemerintahan. Pamong praja dapat diartikan sebagai pegawai pemerintahan yang bertugas mengasuh dalam artian membimbing, melindungi dan melayani masyarakat. Ini berbeda dengan istilah sebelumnya yaitu pangreh praja yang digunakan pada masa kolonial hingga sekitar awal kemerdekaan. Kepangrehprajaan pada masa kolonial termasuk urusan dalam negeri (*binnenlands bestuur*) yang di dalamnya mengandung makna kekuasaan. Sebutan pangreh praja biasa dilekatkan pada penguasa lokal yang bertanggung jawab atas wilayah dan penduduk yang dikuasainya.

Berubahnya sebutan pangreh praja menjadi pamong praja tentu beralasan. Sebagai pegawai negeri yang mengurus jalannya pemerintahan diharapkan pamong praja tidak berlaku layaknya para penguasa feodal di masa sebelum kemerdekaan. Penguasa feodal menuntut penghormatan yang berlebihan, pengakuan absolut akan kekuasaannya dan merasa harus dilayani bukan melayani. Sayangnya meskipun sudah lama diistilahkan sebagai pamong praja namun seringkali lagak laiknya pangreh praja justru lebih tampak.

Mengabdi dan Melayani

Pamong praja memainkan peran sebagai abdi negara yang berarti pula abdi masyarakat. Untuk itulah konsep sebagai pengabdi yaitu orang yang sepenuhnya membaktikan diri bagi negara dan masyarakat harus benar-benar terinternalisasi. Tentu saja pamong praja sebagai eksekutor dalam pemerintahan tidak dipungkiri memiliki kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan di sini harus dipahami dari perspektif yang berbeda. Kekuasaan jangan sampai diartikan sebagai kewenangan seluas-luasnya untuk memaksakan se-